

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM DALAM
PENENTUAN BESARAN PESANGON PASCA BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH
DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS NOMOR
220K/Pdt.Sus-PHI.2022)**

TESIS



Oleh :

NAMA : ADVENTY NATALIA DAELI

NIM : 2002190063

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM DALAM
PENENTUAN BESARAN PESANGON PASCA BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH
DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS NOMOR
220K/Pdt.Sus-PHI.2022)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Oleh :

NAMA : ADVENTY NATALIA DAELI

NIM : 2002190063

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA

PERNYATAAN KEASILAN KARYA TUGAS AKHIR

Nama : Adventy Natalia Daeli
NIM : 2002190063
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis
Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Dalam Penentuan Besaran Pesangon Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Nomor 220K/Pdt.Sus-PHI.2022)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan publikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar magister di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 29 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

METERAL
TEMPER
0B43AJX787739239

Adventy Natalia Daeli



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

JUDUL: Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Dalam Penentuan Besaran Pesangon Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Nomor 220K/Pdt.Sus-PHI.2022)

Nama : Adventy Natalia Daeli
Nim : 2002190063
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 29 Juli 2022
Menyetujui,

PEMBIMBING I

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.
NIDN : 8831640017

PEMBIMBING II

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIDN : 0327096504

Program Studi Magister Hukum

Ketua

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.
NIDN : 8831640017

Program Pascasarjana

Direktur

Dr. Bintang R. Simbolon, M. Si.
NIDN : 0320086508



PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 1 Agustus 2022 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Adventy Natalia Daeli
Nim : 2002190063
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Dalam Penentuan Besaran Pesangon Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Nomor 220K/Pdt.Sus-PHI.2022) oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji

Jabatan tim Tanda Tangan

1. Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

Ketua

2. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

Penguji

3. Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H.

Penguji

Jakarta, 1 Agustus 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA

PERYATAAN PERSETUJUAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adventy Natalia Daeli
Nim : 2002190063
Program Studi : Hukum Program Magister Pasca Sarjana
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Dalam Penentuan Besaran Pesangon Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Nomor 220K/Pdt.Sus-PHI.2022)

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik diperguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain dan bila saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk perangkat data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas Akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku,

Jakarta, 1 Agustus 2022


1000
METERAL TEMPEL
EDB4AJX787739234
Adventy Natalia Daeli

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa baik atas Berkat dan Kasih Karunia dalam menuntun dan memberikan kemampuan dalam pembuatan tesis berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM DALAM PENENTUAN BESARAN PESANGON PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS NOMOR 220K/Pdt.Sus-PHI.2022)”** sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan Tesis ini merupakan syarat untuk mencapai Gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu Penulis memberikan saran, ide dan masukan-masukan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
2. Dr. *Wiwik* Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah membimbing Penulis di dalam pembuatan Proposal Penelitian Tesis ini sampai Tesis ini selesai.

3. Suami dan kedua anak saya yang selalu memahami dan mendukung saya berkuliah kembali.
4. Kedua orang tua yaitu mama papa, kedua abang dan adik yang selalu mendukung, memberikan semangat dan motivasi.
5. Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.M., CPA dan tim di Mangatur Nainggolan Law Firm (MNL) yang sudah memberikan waktu, tenaga dan pikiran dalam berdiskusi mengenai Penulisan Tesis saya.
6. Kawan-kawan kerja di Grup Adaro yang selalu menyemangati perkuliahan dan supaya dapat menyelesaikan Magister Hukum.
7. Bapak Ibu Dosen Pengajar dan para Karyawan Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Hukum Pascasarjana Angkatan 2020 Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini.

Jakarta, 22 Juli 2022

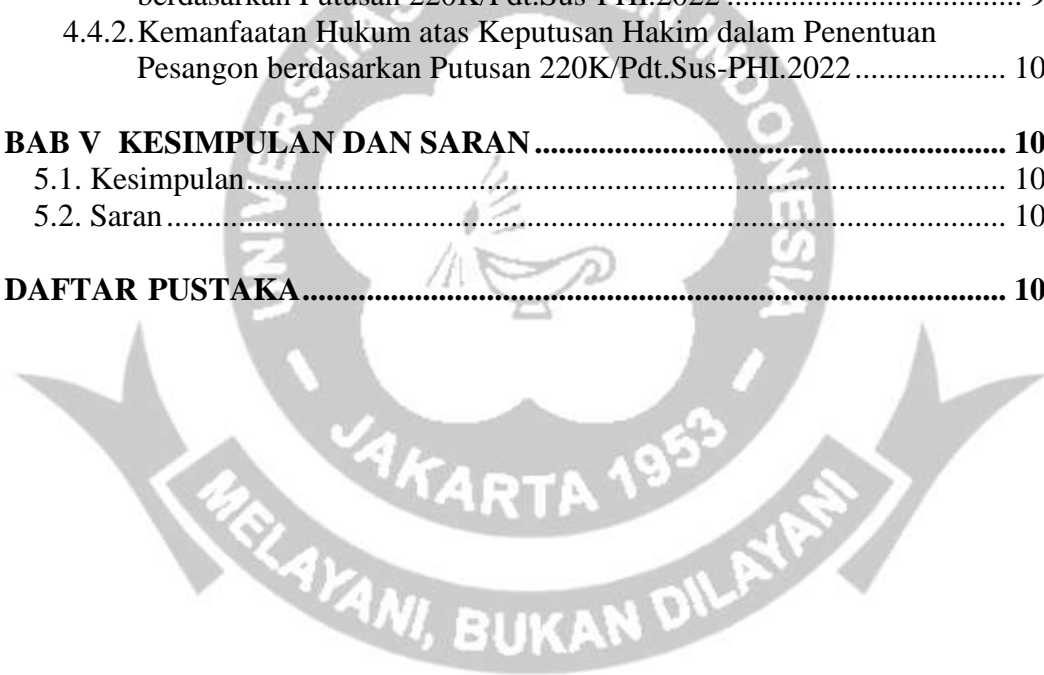
Penulis

Adventy Natalia Daeli

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSTUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan masalah	17
1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian	18
1.3.1. Maksud Penelitian.....	18
1.3.2. Tujuan Penelitian	18
1.4. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual	18
1.4.1. Teori Kepastian Hukum.....	19
1.4.2. Teori Kemanfaatan Hukum	29
1.5. Metode Penelitian.....	34
1.5.1. Jenis Penelitian	34
1.5.2. Spesifikasi Penelitian.....	35
1.5.3. Jenis dan Sumber Data.....	35
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1.5.5. Metode Analisis	36
1.6. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	38
2.1. Hubungan Kerja	38
2.2. Hubungan Industrial	38
2.3. Pentingnya Kompensasi	39
2.4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	42
2.5. Pekerja	42
2.6. Pengusaha.....	42
2.7. Perusahaan.....	43
2.8. PKWT dan PKWTT	43
2.9. Serikat Pekerja (Serikat Buruh atau <i>Labour Union</i>)	45
2.10. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial.....	47
2.11. Perundingan Bipartit.....	48
2.12. Penyelesaian Melalui Arbitrase.....	58

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENENTUAN PESANGON MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN.....	61
3.1. Penentuan Pesangon Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021	61
3.2. Penyebab Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	72
3.3. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan Kerja yang bersifat tetap, tidak ada batasan waktu.....	79
BAB IV KEPUTUSAN HAKIM DALAM PENENTUAN PESANGON BERDASARKAN PUTUSAN 220K/Pdt.Sus-PHI.2022.....	82
4.2. Pertimbangan Hakim	88
4.3. Putusan Hakim	91
4.4. Analisis	91
4.4.1. Kepastian Hukum atas Keputusan Hakim dalam Penentuan Pesangon berdasarkan Putusan 220K/Pdt.Sus-PHI.2022	92
4.4.2. Kemanfaatan Hukum atas Keputusan Hakim dalam Penentuan Pesangon berdasarkan Putusan 220K/Pdt.Sus-PHI.2022.....	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
5.1. Kesimpulan.....	106
5.2. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109



DAFTAR TABEL

Tabel: 4.1. Nama-nama tergugat	82
Tabel 4.2. Pengupahan	85
Tabel 4.3. Kompensasi	86
Tabel 4.4. Gabungan	87
Tabel. 4.5. Gabungan Didasarkan Pada Putusan Hukum.....	89



ABSTRAK

Nama : Adventy Natalia Daeli
NIM : 2002190063
Judul : **Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Dalam Penentuan Besaran Pesangon Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (STUDI KASUS NOMOR 220K/Pdt.Sus-PHI.2022)**

Mahkamah Konstitusi belum menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 karena masih dalam perbaikan. Pemerintah berusaha merumuskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada 30 Juli 2019, PT Tang Mas melakukan Proses Perundingan Bipartit dan 2 Agustus 2019, PT Tang Mas memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 212 pekerjanya. Penelitian ini menggunakan Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Penelitian Hukum Normatif serta bersifat deskriptif analitis sedangkan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan Teknik Data Studi Pustaka dan pendekatan secara Yuridis Kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari 212 pekerja yang di PHK hanya 27 pekerja yang menerima pesangon. Sarannya adalah PT Tang Mas akan baik sekali jika membuat *Man Power Plan (MPP)* yang tepat sasaran. Maksudnya adalah dalam penerimaan pekerja harus dihitung lima tahun ke depan proyeksinya bagaimana, apakah perlu penambahan orang atau tidak dalam pengambilan keputusan penambahan pekerja. Jika memang harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), usahakan ini adalah keputusan terakhir.

Kata Kunci : Pesangon, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

ABSTRACT

Name : Adventy Natalia Daeli
NIM : 2002190063
Title : **JURIDICAL REVIEW OF THE APPLICATION OF LAW IN DETERMINING THE AMOUNT OF SEVERANCE PAY AFTER THE ENFORCEMENT OF GOVERNMENT REGULATION CERTAIN TIME, OUTSOURCING, WORKING TIME AND REST TIME AND TERMINATION OF EMPLOYMENT (CASE STUDY NO. 220K/Pdt.Sus-PHI-2022)**

The Constitutional Court has not declare the Constitution no. 11 of 2020 invalid because it is still under of revision. The Government is trying through Government Regulation no. 35 of 2021 that concerning Work Termination for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time and Termination of Employment in accordance with the provisions of Article 81 and Article 185 (2) of the Constitution no. 11 of 2020 that concerning of Cipta Kerja. 30th July 2019, PT Tang Mas carried out of the Bipartite Negotiation Process and 2nd August 2019, PT Tang Mas imposed Termination of Employment for 212 workers. This study used the principle of legal certainty, legal benefits and normative legal research using data study is of the 212 workers who were laid off only 27 workers received severance pay. Suggestion of PT Tang Mas that to make Man Power Planning (MPP) to recruit workers to right target. PT Tang Mas have to calculate in the next five years how it is estimated whether or not additional people are needed in making decision to add workers. If really have to do the Termination of Employment, it have to be the last decision.

Keywords : Compensation, Termination of Employment (PHK)